



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK
AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL PERUBAHAN
PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 2 September 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara ASEAN;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan *Protocol* tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN).

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangall
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2004
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 164



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, yang merupakan Negara-negara Anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (selanjutnya disebut ASEAN);

MENGINGAT Perjanjian Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN yang telah di tandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, dimana pada pasal 1 paragraph 3 mengatur bahwa semua negara-negara anggota harus berpartisipasi dalam perjanjian ekonomi . intra ASEAN, dan sebagai pelaksanaan dari pada perjanjian ekonomi ini, dua atau lebih negara anggota dapat melaksanakan perjanjian tersebut terlebih dahulu jika negara-negara anggota lain belum siap;

MENGINGAT keputusan yang telah diambil dalam Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) yang diselenggarakan di Genting Highland, Malaysia pada tanggal 6 Juli 2002 untuk mempercepat tiberalisasi perdagangan bidang jasa di antara para Negara Anggota;

MENGINGINKAN untuk mempercepat liberalisasi perdagangan bidang jasa di ASEAN dengan melalui ASEAN-X formula, berdasarkan parameter yang telah disahkan dalam pertemuan AEM ke tigapuluhempat yang disetenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 12 September 2002;

MEMPERHATIKAN Perjanjian Bidang Jasa ASEAN (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 dalam pertemuan Para Pemimpin Negara ASEAN ke lima yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand dimana dalam Pasal II paragraph I mengatur bahwa dua atau lebih Negara Anggota dapat melaksanakan perjanjian terlebih dahulu apabila negara anggota lainnya belum siap untuk metakukan kerjasama sebagaimana diatur datam Perjanjian;

BERKENAAN DENGAN Pasal XII Perjanjian tersebut, yang memungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Perjanjian diubah dengan menambahkan pasal baru yaitu "Pasal IV bis" sesudah Pasal IV, sehingga dibaca sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal IV Perjanjian, dua atau lebih Negara Anggota dapat melakukan perundingan untuk metakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa sektor atau sub-sektor yang spesifik (selanjutnya disebut "Negara Anggota yang berpartisipasi"). Perluasan perlakuan khusus terhadap Negara Anggota lainnya atas dasar MFN dilakukan secara sukarela.
2. Negara Anggota yang berpartisipasi harus menginformasikan kepada Negara Anggota lainnya melalui Sekretariat ASEAN atas hasil perundingan-perundingan yang dilakukan, termasuk komitmen. atas sektor atau sub-sektor yang dirundingkan. Negara Anggota lainnya diperbolehkan mengikuti perundingan di antara Negara Anggota yang berpartisipasi setelah metakukan konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.
3. Negara Anggota yang tidak termasuk dalam pihak-pihak seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dapat ikut serta dengan membuat komitmen yang sama atau yang dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi.
4. Negara Anggota yang berpartisipasi dapat metakukan perubahan parameter sektor atau sub-sektor spesifik yang akan diliberalisasikan atas persetujuan Negara-negara anggota yang berpartisipasi, dalam rangka meningkatkan liberalisasi perdagangan bidang jasa.
5. Perjanjian-perjanjian yang dihasilkan berdasarkan ayat 1 disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan mengedarkan salinannya ke masing-masing negara anggota.

PASAL 2

1. Protokol ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2004.
2. Protokol ini disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan mengedarkan salinannya ke masing-masing negara anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

DISAKSIKAN yang memberikan tanda tangan di bawah ini, yang telah diberikan wewenang oleh Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal dua September 2003, dalam satu salinan berbahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam
ABDUL RAHMAN TAIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Utama

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja
CHAM PRASIDH
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia
RINI M.S. SUWANDI
Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos
SOULIVONG DARAYONG
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia
RAFIDAH AZIZ
Menteri Industri dan Perdagangan Internasional

Untuk Pemerintah Uni Myanmar
U KHIN MAUNG WIN
Deputi Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Filipina
MAR ROXAS
Menteri Perdagangan dan Industri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Untuk Pemerintah Republik Singapura
B.G.(NS) rpEORGE YON-BOON YEO
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand
ADISAI BODHARAMIK
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
TRUONG DINH TUYEN
Menteri Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

INTERPRETASI PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN

PROTOKOL	INTERPRETASI
<p>Pasal 1, Ayat 1</p> <p>Berdasarkan Pasal IV Perjanjian, dua atau lebih Negara Anggota dapat metakukan perundingan untuk metakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa sektor atau sub-sektor yang spesifik (selanjutnya disebut "Negara Anggota yang berpartisipasi").</p> <p>Perluasan pertakuan khusus terhadap Negara Anggota lainnya atas dasar MFN ditakukan secara sukarela.</p>	<p>Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempertuas dan memperdalam liberalisasi sektor atau sub-sektor, termasuk sektor atau sub-sektor yang disetujui dalam common sub-sector.</p> <p>Pertuasan perlakuan khusus kepada Negara Anggota lainnya secara sukarela harus dilakukan tanpa syarat, tidak diskriminatif dan tanpa timbal balik.</p>
<p>Pasal 1, Ayat 2</p> <p>Negara Anggota yang berpartisipasi harus menginformasikan kepada Negara Anggota lainnya melalui Sekretariat ASEAN atas hasil perundinganperundingan yang ditakukan, termasuk komitmen atas sector atau sub-sektor yang dirundingkan. Negara Anggota lainnya diperbolehkan mengikuti perundingan di antara Negara Anggota yang</p>	<p>Konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi harus ditakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi Negara Anggota lainnya.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

<p>berpartisipasi setelah melakukan konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.</p>	
<p>Pasal 1, Ayat 3</p> <p>Negara anggota yang tidak termasuk dalam pihak-pihak seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dapat ikut serta dengan membuat komitmen yang sama atau yang dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi.</p>	<p>Pengertian dari "komitmen yang dapat diterima" dimaksudkan hanya untuk komitmen yang diajukan oleh Negara Anggota yang ingin bergabung sesuai Pasal 1 ayat 1 protokol ini dan dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi dengan memperhatikan adanya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor-sektor yang tertentu.</p>
<p>PROTOKOL</p>	<p>INTERPRETASI</p>
	<p>Negara Anggota yang berpartisipasi tidak dapat menetapkan persyaratan tingkat komitmen yang lebih tinggi kepada negara anggota lainnya, daripada komitmen mereka.</p> <p>meningkatkan level komitmen yang lebih tinggi dari Negara-negara anggota melebihi komitmen masing-masing yang telah diatur oleh perjanjian ini</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<p>Pasal 2, Ayat 1</p> <p>3. Protokol ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2004.</p>	<p>Semua negara anggota diharuskan untuk metengkapi prosedur internal masingmasing, untuk memberlakukan protocol ini sebelum at.au pada 31 Desember 2004 dan menginformasikan kepada Sekretariat ASEAN.</p>
--	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

RECALLING the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore, of which Article I paragraph 3 provides that all Member States shall participate in intra-ASEAN economic arrangements, provided that, in the implementation of these economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements;

RECALLING the decision of the ASEAN Economic Ministers (AEM) at their Retreat held in Gerroting Highlands, Malaysia on 6 July 2002 to accelerate services liberalization within Member States;

DESIRING to expedite the liberalization of trade in services within ASEAN through the implementation of the ASEAN-X formula, based on the parameters endorsed by the AEM at their 34th Meeting held in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 12 September 2002;

NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services (hereinafter referred to as "the Framework Agreement") signed on 15 December 1995 at the Fifth ASEAN Summit held in Bangkok, Thailand, where Article 11 paragraph 1 provides that two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement cooperation arrangements under the Framework Agreement;

REFERRING to Article XII of the Framework Agreement, which provides for amendments;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

The Framework Agreement shall be amended by adding a new "Article IV bis" immediately after the existing Article IV to read as follows:

1. Notwithstanding the provisions of Article IV of this Framework Agreement, two or more Member States may conduct negotiations and agree to liberalize trade in services for specific sectors or sub-sectors (hereinafter referred to as "the participating Member States"). Any extension of such preferential treatment to the remaining Member States on an MFN basis shall be voluntary and part of the participating Member States.
2. The participating Member States shall keep the remaining Member States informed through the ASEAN Secretariat of the progress or result of the negotiations, including the scheduling of commitments for the specific sectors or sub-sectors concerned. Member States wishing to join any on-going negotiations among the participating Member States may do so in consultation with the participating Member States.
3. Member State which is not a party to any agreement reached pursuant to paragraph 1 may in due course become a party to such an agreement upon making offers at similar or acceptable levels to the participating Member States.
4. The participating Member States can further refine the parameters for specific sectors or sub-sectors to be committed as may be mutually agreed by all participating Member States for the purpose of further liberalization of trade in services.
5. All agreements reached pursuant to paragraph 1 shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State."

ARTICLE 2

1. This protocol shall enter into force on 31 December 2004.
2. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.”

IN WITNESS WHEREOF, undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services.

DONE at Phnom Penh, Cambodia, on this 2nd day of September in the Year Two Thousand and Three, in a single copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam
ABDUL RAHMAN TAIB
Minister of Industry and Primary Resources

For the Government of the Kingdom of Cambodia
CHAM PRASIDH
Minister of Commerce

For the Government of the Republic of Indonesia
RINI M.S. SUWANDI
Minister of Industry and Trade

For the Government of the Lao People's Democratic Republic
SOULIVONG DARAVONG
Minister of Commerce

For the Government of Malaysia
RAFIDAH AZIZ
Minister of International Trade and Industry

For the Government of the Union of Myanmar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

U KHIN MAUNG WIN
Deputy Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Republic of the Philippines
MAR ROXAS
Secretary of Trade and Industry

For the Government of the Republic Singapore
B.G. (NS) GEORGE YONG-BOON YEO
Minister for Trade and Industry

For the Government of the Kingdom of Thailand
ADISAI BODHARAMIK
Minister of Commerce

For the Government the Socialist Republic of Vietnam
TRUONG DINH TUYEN
Minister of Trade



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

INTERPRETATIVE NOTES
TOPROTOCOL TO AMEND
THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES

Protocol	Interpretative Notes
<p><u>Article 1, paragraph 1</u></p> <p>Notwithstanding the provisions of Article IV of this Framework Agreement, two or more Member States may conduct negotiations and to liberalize trade in services for specific sectors or sub-sectors (hftcr referred to as "the participating Member States"). Any extension such preferential treatment to the remaining Member States on an MFN basis shall be voluntary on the part of the participating Member States.</p>	<p>This approach shall be used to expand and deepen liberalization of service sectors or sub-sectors, including sectors or subsectors agreed under the common subsector approach.</p> <p>Any preferential treatment extended to the remaining Member States on a voluntary basis shall be unconditional, nondiscriminatory and without the nccd for reciprocity.</p>
<p><u>Article 1, paragraph 2</u></p> <p>The participating Member States shall keep the remaining Member States informed through the ASEAN Secretariat of the progress or result of the negotiations, including the scheduling commitments for the specific sectors or sub-sectors concerned. Member States wishing to join any on going negotiations among</p>	<p>Consultation with the participating Member States shall be undertaken with a view to facilitate and encourage the participation of the remaining Member States.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<p>the participating Member States may do so in consultation with the participating Member States.</p>	
<p><u>Article 1, paragraph 3</u></p> <p>Any Member State which is not a party to any agreement pursuant to paragraph 1 may in due course become a party to such agreement upon making offers at similar or acceptable levels to the participating Member States.</p>	<p>The reference to "acceptable level" here applies only to offers made by Member States wishing to join an agreement reached pursuant to paragraph 1 of Article 1 of this protocol and deemed acceptable by all the participating Member States, taking into account developmental differences, both in terms of economic and stage of development of the particular sector.</p>
<p>Protocol</p>	<p>Interpretative Notes</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

	The participating Member States shall not require a higher level of commitments from the remaining Member States than their respective commitments under the agreement.
<u>Article 2, paragraph 1</u> This Protocol shall enter into force on 31 December 2004.	All Member States undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this protocol on or before 31 December 2004 and to inform the ASEAN Secretariat of the date of completion.